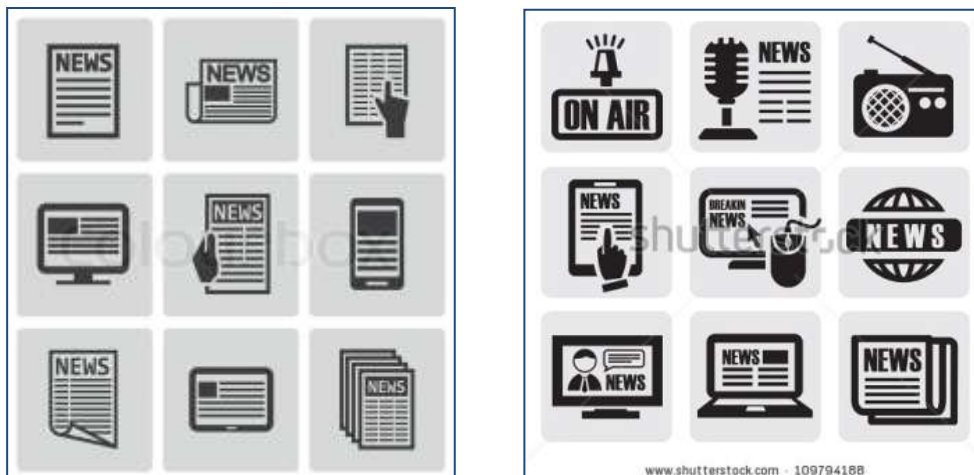




e-Newspaper Media Online

Sarana & Prasarana

Senin, 21 Agustus 2017



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jakarta, Bappenas
2017**

Daftar Isi

1. SEJUTA RUMAH BELUM MAKSIMAL (*Media Online Kompas*)
2. INFRASTRUKTUR TETAP JADI PRIORITAS (*Media Online Media Indonesia*)

KOMPAS

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

Senin

21 Agustus 2017

Sejuta Rumah Belum Maksimal

Pembangunan Rusunawa Tidak Lebih dari 10 Persen

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dinilai belum maksimal menjalankan program sejuta rumah yang tahun ini memasuki tahun ketiga. Untuk itu, pemerintah pun diharapkan fokus pada penyediaan rumah umum berupa rumah susun sederhana sewa, bukan rumah komersial.

Untuk itu, penguatan Perum Perumnas perlu dilakukan sebagai garda terdepan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Sudah banyak program yang diluncurkan oleh pemerintah sejak dulu. Namun, untuk masalah papan, kita masih belum merdeka. Khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah, negara wajib hadir, tidak bisa hanya mengandalkan swasta," kata Ketua Umum Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia Zulfri Syarif Koto, Minggu (20/8), ketika dihubungi di Jakarta.

Menurut Zulfri, program sejuta rumah semestinya dilakukan oleh pemerintah melalui Perum Perumnas, bukan dengan mengandalkan swasta. Itu karena Perum Perumnas didirikan un-

tuk menjalankan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sementara swasta pada dasarnya mencari keuntungan. Maka, jika target pemerintah ingin mengurangi angka kekurangan rumah (*backlog*) yang jumlahnya 13,5 juta unit, yang seharusnya berada di depan adalah Perum Perumnas. Adapun angka kekurangan rumah berdasarkan kependudukan sebesar 7,6 juta unit.

Secara terpisah, pengajar Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Institut Teknologi Bandung, M Jehansyah Siregar, mengatakan, arah kebijakan pemerintah masih belum jelas. Kebijakan pembiayaan perumahan dalam program sejuta rumah, seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), subsidi selisih bunga, dan bantuan uang muka, merupakan ke-

bijakan untuk mendorong rumah komersial, bukan rumah umum (*public housing*).

Padahal, ketersediaan rusunawa akan lebih cepat mengurangi angka *backlog* karena sifatnya massal dengan sistem sewa yang terjangkau. Masyarakat berpenghasilan rendah tidak harus membeli, tetapi bisa menyewa.

"Kebijakan untuk rumah komersial tidak akan efektif mengurangi *backlog* karena fiskal pemerintah terbatas. Paling hanya bisa membiayai sampai 100.000 unit per tahun," kata Jehansyah.

Menurut Jehansyah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menargetkan pembangunan rusunawa sebanyak 550.000 unit. Namun, dalam tiga tahun ini yang sudah terbangun tidak lebih dari 10 persen atau sekitar 33.000 unit. Karena itu, alokasi pembiayaan rumah diharapkan dapat difokuskan membangun rusunawa dalam skala besar di kawasan perkotaan.

"Program sejuta rumah jangan hanya fokus pada pembiayaan perumahan komersial, tetapi juga untuk membangun rumah

umum, seperti rusunawa. Kalau pembiayaan perumahan rumah komersial itu, sama dengan subsidi ke pengembang," ujarnya.

Untuk Perum Perumnas, lanjut Jehansyah, dulu Perum Perumnas diberi kewenangan untuk mengembangkan kawasan siap bangun (*kasiba*) yang kemudian menjadi cikal bakal kawasan baru, seperti Depok dan Klender. Kini, pemerintah mesti memberi kewenangan dan dukungan dana agar Perum Perumnas dapat berperan mengembangkan *kasiba* dan menyediakan perumahan rakyat.

Alokasi meningkat

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif Burhamuddin mengatakan, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa meningkat hingga tiga kali lipat.

"Dalam tiga tahun terakhir ini anggarannya mencapai Rp 4 triliun setiap tahun. Dulu biasanya hanya sekitar Rp 1 triliun," kata Syarif.

Meskipun di dalam RPJMN 2015-2019 direncanakan pembangunan 550.000 unit rusunawa, lanjut Syarif, jumlah tersebut tidak hanya berasal dari APBN saja, tetapi juga dari APBD dan masyarakat. Setiap tahun, sejak 2015, sekitar 10.000 rusunawa telah dibangun meski pada 2016 lalu hanya sekitar 7.000 unit. Hingga akhir tahun ini ditargetkan rusunawa yang dibangun sekitar 13.000 unit dengan 7.500 unit berada di Kemayoran, Jakarta, yang nanti akan difungsikan menjadi wisma atlet.

Terkait dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pasal 23 untuk membentuk tim koordinasi percepatan pembangunan, menurut Syarif, hal itu telah disepakati dengan membentuk tim lintas kementerian berdasar keputusan Menteri Koordinator Perekonomian.

"Agar lebih cepat, tim dibentuk dulu sembari menunggu terbitnya keputusan presiden yang menjadi dasar tim koordinasi percepatan pembangunan," ujar Syarif. (NAD)

Pemerintah dinilai belum maksimal menjalankan program sejuta rumah yang tahun ini memasuki tahun ketiga. Untuk itu, pemerintah pun diharapkan fokus pada penyediaan rumah umum berupa rumah susun sederhana sewa, bukan rumah komersial dan program yang diluncurkan oleh pemerintah

Hashtag Berita :

#Infrastruktur #SatuJutaRumah #MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia
 #PelaksanaanProgramNasional #KementerianPekerjaanUmumdanPerumahanRakyat
 #RPJMN #PERUMNAS

